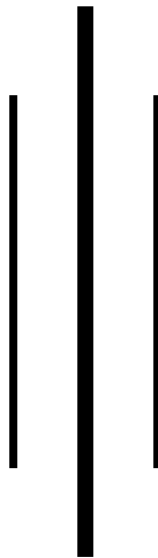




**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD)
KECAMATAN BOJA
TAHUN 2026**



KECAMATAN BOJA

Jl. Pramuka No. 07 Boja, Telp./Fax. (0294)571002

Laman: kecboja.kendalkab.go.id, Pos-el : kecboja@gmail.com 51381

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2026 dapat terselesaikan. Penyusunan Renja Kerja Ke camatan Boja ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, bahwa setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Kerja sebagai acuan perencanaan kegiatan kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Renja Kerja Kecamatan Boja ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Boja Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Boja Tahun 2026, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2026 yang akan datang.

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Boja, yang telah membantu dalam penyusunannya. Kami menyadari dalam penyusunan Renja Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan Renja Kerja di tahun yang akan datang.

Kendal, 29 September 2025

CAMAT BOJA,

SUNARTO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19690617 199803 1006

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator yang ditentukan dalam standar pelayanan	31
2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	35
2.5 Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional	46
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	50
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	66
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.....	66
BAB V PENUTUP	72

Lampiran-lampiran

1	SK Tim Penyusunan Renja 2026	75
2	Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	75

DAFTAR TABEL

		Hal
1	Tabel T.C.29 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024	20
2	Tabel 2.2 Realisasi Keuangan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada urusan wajib kewilayahan Tahun 2024	26
3	Tabel 23 Perinciaan Keuangan Pelaksanaan program dan Kegiatan pada urusan wajib Kewilayahan Tahun 2024	28
4	Tabel T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	34
5	Tabel T.C 31 Review Rancangan akhir RKPD Tahun 2026 Kab. Kendal	38
6	Tabel T.C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026	45
7	Tabel 31 Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, kabupaten dan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026	48
8	Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Boja Tahun 2026.....	51
9	Tabel T.C 33 Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan maju 2027 Kabupaten Kendal.....	60

BAB I

PENDAHULAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu serta berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periodes sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No.25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten, sedangkan, Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana kerja Kecamatan Boja Tahun 2026 merupakan Rencana Pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kendal periode 2021-2026, Namun, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045, maka penyusunan Rancangan Awal RKPD juga mempedomani RPJPD tersebut, Selain itu, karena pada tahun 2025 merupakan tahun penyusunan RPJMD 2025-2029, maka penyusunan Ranwal RKPD tahun 2026 juga akan mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Tema Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 adalah **"Bersinergi Membangun Kendal Semakin Maju dan Berdikari"** menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dalam 5 (lima) Tahun ke depan adalah **"Sustainable Kendal"**. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Kendal dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Kendal maka setiap OPD harus menjalankan visi dan misi Kepala Daerahnya adapun misi yang harus dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Boja adalah Misi Kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757););

6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).

3.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan target indikator program yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan acuan Perangkat Daerah untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
2. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.

3. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani
4. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Boja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Boja.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Boja sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Kecamatan Boja melaksanakan sebanyak 5 (Lima) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 3.158.093.347,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 2.981.660.347,- atau sebesar 94.41%.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026, dengan Tahun 2025 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana Tabel T.C.29.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain

- | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 2.408.445.047,- |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 2.165.702.296,- |
| | Realisasi anggaran (%) | : 89.92% | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah terbayarnya gaji dan | |
| | keluaran kegiatan | tunjangan PNS | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 14 Bulan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 14 Bulan | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Indikator Kinerja Antara Lain:

- | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 85.080.000 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 85.080.000 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 100% | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah bulan terbayarnya honor | |
| | keluaran kegiatan | pengelola pengadaan barang/jasa dan | |
| | | penatausahaan keuangan | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 12 Bulan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 12 Bulan | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 (Tujuh) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1	Pagu anggaran	: Rp.	3.500.000
	Realisasi anggaran	: Rp.	3.416.000
	Realisasi anggaran (%)	: 97,6%	
2	Indikator kinerja capaian	: Jumlah bulan tersedianya Komponen	
	keluaran kegiatan	Instalasi Listrik/Penerangan	
3	Target capaian kegiatan	: 12 Bulan	
4	Realisasi capaian kegiatan	: 12 Bulan	
5	Tingkat capaian kinerja (%)	: 100 %	

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1	Pagu anggaran	: Rp.	46.909.000
	Realisasi anggaran	: Rp.	46.882.050
	Realisasi anggaran (%)	: 99,94%	
2	Indikator kinerja capaian	: Jumlah bulan tersedianya Peralatan	
	keluaran kegiatan	dan Perlengkapan Kantor	
3	Target capaian kegiatan	: 12 Bulan	
4	Realisasi capaian kegiatan	: 12 Bulan	
5	Tingkat capaian kinerja (%)	: 100 %	

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1	Pagu anggaran	: Rp.	4.000.000
	Realisasi anggaran	: Rp.	3.830.000
	Realisasi anggaran (%)	: 95,75%	
2	Indikator kinerja capaian	: Jumlah bulan tersedianya	
	keluaran kegiatan	peralatan rumah tangga	
3	Target capaian kegiatan	: 12 Bulan	
4	Realisasi capaian kegiatan	: 12 Bulan	
5	Tingkat capaian kinerja (%)	: 100 %	

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 3.206.000 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 1.200.000 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 37,42% | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah bulan tersedianya makan | |
| | keluaran kegiatan | minum rapat | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 12 Bulan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 12 Bulan | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 21.318.300 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 21.144.200 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 99,18% | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah bulan tersedianya Barang | |
| | keluaran kegiatan | Cetakan dan Penggandaan | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 12 Bulan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 12 Bulan | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp.0,- |
| | Realisasi anggaran | : Rp.0,- |
| | Realisasi anggaran (%) | : 0 % |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah bulan Penyediaan bahan |
| | keluaran kegiatan | bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 12 Bulan |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 12 Bulan |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 0 % |

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 137.211.000 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 137.173.744 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 99,97 % | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : tersedianya bahan bakar minyak, | |
| | keluaran kegiatan | makan minum rapat kegiatan, dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 12 Bulan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 12 Bulan | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

a. Pengadaan Mebel

- | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp.0,- | |
| | Realisasi anggaran | : Rp.0,- | |
| | Realisasi anggaran (%) | : 0,- % | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah Alat Kantor dan Rumah | |
| | keluaran kegiatan | Tangga yang diadakan | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 14 unit | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 14 unit | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 27.050.000 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 27.050.000 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 100 % | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah aset peralatan dan mesin | |
| | keluaran kegiatan | yang diadakan | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 4 unit | |

- 4 Realisasi capaian kegiatan : 4 unit
- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 1 Pagu anggaran : Rp. 8.000.000
Realisasi anggaran : Rp. 8.000.000
Realisasi anggaran (%) : 100 %
- 2 Indikator kinerja capaian : Jumlah materai yang tersedia
keluaran kegiatan
- 3 Target capaian kegiatan : 500 buah
- 4 Realisasi capaian kegiatan : 500 buah
- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1 Pagu anggaran : Rp. 52.125.000
Realisasi anggaran : Rp. 48.104.037
Realisasi anggaran (%) : 92,28%
- 2 Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air,
keluaran kegiatan internet dan listrik
- 3 Target capaian kegiatan : 12 bulan
- 4 Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

- 1 Pagu anggaran : Rp. 159.000.000
Realisasi anggaran : Rp. 158.721.695
Realisasi anggaran (%) : 99,82%
- 2 Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersedianya honor tenaga
keluaran kegiatan Administrasi
- 3 Target capaian kegiatan : 12 bulan

- 4 Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1 Pagu anggaran : Rp. 45.150.000
- Realisasi anggaran : Rp. 43.271.000
- Realisasi anggaran (%) : 95,83 %
- 2 Indikator kinerja capaian : Jumlah kendaraan dinas yang diservis
keluaran kegiatan dan diganti suku cadang
- 3 Target capaian kegiatan : 12 bulan
- 4 Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 1 Pagu anggaran : Rp. 48.000.000
- Realisasi anggaran : Rp. 47.966.350
- Realisasi anggaran (%) : 99,92 %
- 2 Indikator kinerja capaian : Jumlah unit gedung kantor dan
keluaran kegiatan bangunan lainnya yang
dipelihara/diperbaiki
- 3 Target capaian kegiatan : 12 bulan
- 4 Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan Indikator Kinerja antara lain

:

- 1 Pagu anggaran : Rp.0,00,-
 Realisasi anggaran : Rp.0,00,-
 Realisasi anggaran (%) : 0,-%
- 2 Indikator kinerja capaian : Jumlah kegiatan yang terkait dengan
 keluaran kegiatan pelayanan perizinan non usaha
- 3 Target capaian kegiatan : 1 kegiatan
- 4 Realisasi capaian kegiatan : 1 kegiatan
- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 3 (tiga) sub kegiatan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain

- 1 Pagu anggaran : Rp. 298.000
 Realisasi anggaran : Rp. 298.800
 Realisasi anggaran (%) : 100 %
- 2 Indikator kinerja capaian : jumlah desa yang melaksanakan
 keluaran kegiatan musrenbang
- 3 Target capaian kegiatan : 1 kegiatan
- 4 Realisasi capaian kegiatan : 1 kegiatan
- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- 1 Pagu anggaran : Rp. 149.700.000
 Realisasi anggaran : Rp. 145.623.000

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| | Realisasi anggaran (%) | : 97,27 % |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah kegiatan pemberdayaan yang keluaran kegiatan diusulkan untuk pemerintah dan swasta |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 1 kegiatan |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 1 kegiatan |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % |

c. Peningkatan Efektif Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 8.821.000 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 8.508.000 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 96,45 % | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah kegiatan pemberdayaan yang keluaran kegiatan diusulkan untuk pemerintah dan swasta | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 1 kegiatan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 1 kegiatan | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 40.000 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 39.900 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 99,75% | |
| 2 | Indikator kinerja capaian | : Jumlah kegiatan pemberdayaan yang keluaran kegiatan diusulkan untuk pemerintah dan swasta | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 1 kegiatan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 1 kegiatan | |

- 5 Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 35.000.000 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 30.039.800 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 85,82 % | |
| 2 | Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 1 kegiatan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 1 kegiatan | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

b. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- | | | | |
|---|---|--|-----------|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 1.920.000 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 1.250.000 |
| | Realisasi anggaran (%) | : 64,10 % | |
| 2 | Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 1 kegiatan | |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 1 kegiatan | |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % | |

c. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

- | | | | |
|---|--------------------|-------|---|
| 1 | Pagu anggaran | : Rp. | 0 |
| | Realisasi anggaran | : Rp. | 0 |

- | | | |
|---|---|--|
| | Realisasi anggaran (%) | : 100 % |
| 2 | Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
| 3 | Target capaian kegiatan | : 1 kegiatan |
| 4 | Realisasi capaian kegiatan | : 1 kegiatan |
| 5 | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100 % |

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Boja Tahun 2024, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.158.093.347,- terserap anggaran sebesar Rp. 2.981.660.347,- atau sebesar 94.41%. Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 176.433.000,-, yaitu paling banyak silpa pada anggaran *Gaji dan Tunjangan PNS* karna kekosongan pejabat struktural dan staf dan makan minum rapat kegiatan karena adanya refeisiensi terkait dengan kegiatan makan minum rapat untuk unsur masyarakat.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BOJA
Lembar :

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			KECAMATAN BOJA									
			UNSUR KEWILAYAHAN									
	01		KECAMATAN									
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang Urusan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah			5	5	100	5	5	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	3	4,6
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	12	3	4

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	0	0	0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	96,52	12	3	4
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	99,65	12	3	4
2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	96,74	12	3	4
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	99,86	12	3	4
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	99,46	12	3	4
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	0	0

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	94,46	12	3	4
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemda yang tersedia			100	100	100	100	100	100
3			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	14	36	36	99,52	36	0	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	4	4	96,14	4	0	0
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12	12	12	12
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100	12	3	4
4			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	81,77	12	3	4
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	3	4
5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara			20	20	20	20	20	20
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	12	93	12	3	4

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	2	2	2	98,82	7	1	3
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan			100	100	100	100	100	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokuemn urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1	0	1	1	1	1	0	0
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	0	1	1	83,5	1	0	0
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPd			100	100	100	100	100	100
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			3	3	3	3	3	3
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14	14	14	14	100	14	6	100
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	0	2	2	100	2	2	0
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	1	5	5	99,87	5	1	6.77

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	100	0	0	0
			Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	1	1	100	0	0	0
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	1	1	1	100	0	0	0
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani			100	100	100	100	100	100
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1	1	1	1	1	1	1	1
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	100	0	0	0
	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu (%)			100	100	100	100	100	100
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (dokumen)			18	18	18	18	18	18
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	18	0	18	18	100	18	18	100

				Pendayagunaan Aset Desa								
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18	0	18	18	100	18	18	100
			Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	18	0	18	18	100	18	18	100

Dari data sebagaimana tabel T.C 2.9 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Boja Tahun 2024 : 94,41%

- a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Boja pada Tahun 2024 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 6 (Enam) Program dengan 6 (enam) Indikator Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.
- b. Dari 11 kegiatan, terdapat 10 kegiatan yang memenuhi target, serta 1 kegiatan tidak memenuhi target. Sedangkan dari 22 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 1 indikator yang melampaui target, dan 45 indikator memenuhi target. Indikator yang melebihi target adalah jumlah pelayanan administratif di Kecamatan Boja.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Boja Tahun 2024. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2024 adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada
Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2024

SKPD KECAMATAN BOJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)
Urusan Wajib Kewilayahan	3.158.093.347,00	2.981.660.347,00	94,41%

Adapun perincian keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3

Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan

Wajib Kewilayahan Tahun 2024

Kode Rekening	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik		0	0	0
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	0	0	0
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	0
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
	Program Pemberdayaan Masyarakat		158.819.000	154.429.000	97,23
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	158.819.000	154.429.000	97,23
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa	298.000	298.000	100
		Sinkronisasi Program Kerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	149.700.000	145.623.000	97,27
		Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	8.821.000	8.508.000	0
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		40.000	39.900	99,75

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000	39.900	99,75
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara nasional Indonesia fdan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	40.000	39.900	99,75
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		36.920.000	31.289.800	84,75
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.920.000	31.289.800	84,75
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0
		Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	35.000.000	30.039.800	85,82
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.920.000	1.250.000	65,10
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0
	Program Penunjang urusan pemerintahan		2.962.314.347	2.795.901.647	94,38
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	399.900	99,97
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	0	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400.000	399.900	99,97
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.408445.047	2.250.782.296	93,45

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.323.365.047	2.165.702.296	93,25
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.080.000	85.080.000	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.144.300	213.645.994	98,84
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	3.416.000	97,6
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	46.909.000	46.882.050	99,94
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	3.830.000	95,75
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.206.000	1.200.000	37,42
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	21.318.300	21.144.200	99,18
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan			
		Penyelenggaraann Rapat koordinasi dan Konsultasi	137.211.000	137.173.744	99,97
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.050.000	27.010.375	96,85
		Pengadaan Mebel			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.500.000	25.460.375	99,84
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.125.000	212.825.732	98,01
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.125.000	48.104.037	92,28
		Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	46.909.000	46.882.050	99,94
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	92.560.000	111.048.000	99,98
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.150.000	91.237.350	97,94
		Penyediaan Jasa, pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.150.000	43.271.000	95,83
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	47.966.350	99,92

2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun indikator kinerja kunci.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

(1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
 - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
 - (3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
 - (5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
 - (6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
 - (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
 - (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut Tabel T-C.30 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah KecamatanBoja

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Boja
Kabupaten Kendal

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA KECAMATAN BOJA			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		ANALISIS CATATAN
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	Nilai SAKIP	77	79	80	73,50	73.65	79	80	0
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Nilai rata-rata IKM	88,17	93	93	93,87	93,80	93	93	0

Nilai SAKIP Tahun 2023 yang dinilai Tahun 2024 adalah 73.65 dan nilai IKM Tahun 2023 yang dinilai Tahun 2024 adalah 93,80 penilaian IKM ini dilakukan setiap satu tahun sekali.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Boja

Faktor Pendukung adalah Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Boja tercapai Tersedianya data dan Kerjasama dari semua pihak di Kecamatan Boja

Faktor Penghambat adalah Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Boja kurangnya Pemahaman dan Kurang disiplinnya Pelaporan Kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Boja tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Boja, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Boja sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Boja terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Boja sampai dengan tahun 2025 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.
3. Tumpang Tindihnya Beban Kerja yang di terima dari masing-masing ASN sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
4. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pihak OPD terkait.
5. Disiplin aparatur yang belum optimal
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
7. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat

keberhasilan kinerja pelayanan Perangkat Daerah lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi Perangkat Daerah, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Boja adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran.

Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat daerah

Bahwa didalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Boja terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Kedaulatan Pangan
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Boja adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Perangkat Daerah
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam mengelola sumberdaya yang ada
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2025) table T-C.31.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Boja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal				4.152.038.119	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.924.809.159	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Boja	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	3.930.733.119	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Boja	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	4.100.185.963	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan	5 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan	5 Dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	6 laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	6 laporan	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Boja	Jumlah Orang yang Menerima	35 orang/bulan	3.552.028.119	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Boja	Tersedianya meterai dan perangk	19 orang/bulan	4.095.185.963	

			Gaji dan Tunjangan ASN								
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen hasil penyediaan	12 Dokumen	0	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen hasil penyediaan	12 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun	2 laporan		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun	2 laporan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan keuangan Akhir Bulan	4 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan keuangan Akhir Bulan	4 laporan	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Boja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	18 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Boja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	18 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Boja	Jumlah Paket komponen Instalasi	19 Paket	3.566.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Boja	Jumlah Paket komponen Instalasi	19 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Paket	41.352.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Paket	57.252.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Boja	Jumlah Paket peralatan rumah	2 paket	7.010.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Boja	Jumlah Paket peralatan rumah	2 paket	5.200.000	
	Penyediaan bahan logistik	Kecamatan Boja	Jumlah Paket bahan Logistik kantor	12 paket	5.500.000	Penyediaan bahan logistik	Kecamatan Boja	Jumlah Paket bahan Logistik kantor	12 paket	4.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kecamatan Boja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	27.807.050	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kecamatan Boja	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	25.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen bahan bacaan	12 dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen bahan bacaan	12 dokumen	0	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	128.077.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	217.853.201	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Boja	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan Boja	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	25.000.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah unit peralatan dan mesin	2 unit	0	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah unit peralatan dan mesin	2 unit	50.000.000	
	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.500.000	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	12 laporan	61.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kecamatan Boja	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	12 laporan	56.300.000	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Boja	Jumlah, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	63.936.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Boja	Jumlah, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	159.000.000	
	Pemeliharaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kecamatan Boja	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara	12 unit	26.896.550	Pemeliharaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kecamatan Boja	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara	12 unit	34.929.000	

	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12 unit	6.810.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah Gedung yang di pelihara	1unit	0	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Boja	Jumlah Gedung yang di pelihara	1unit	24.929.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Boja	Jumlah laporan yang diadakan	1 Laporan	19.965.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Boja	Jumlah laporan yang diadakan	1 Laporan	2.050.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	2.050.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non perizinan	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non perizinan	Kecamatan Boja	Jumlah Laporan Koordinasi	1laporan	2.500.000	
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Boja	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1laporan	19.965.000	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Boja	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1laporan	0	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi	1laporan	118.480.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang	1laporan	199.520.000	

	DAN KELURAHAN		yang dilaksanakan ke desa			DESA DAN KELURAHAN		dilaksanakan ke desa			
	Peningkatan Masyarakat dalam forum Musyawaran Perencanaan pembangunan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	15.200.000	Peningkatan Masyarakat dalam forum Musyawaran Perencanaan pembangunan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	25.000.000	
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	90.890.000	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	154.120.000	
	peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaan Mastyarakat Wil Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	12.390.000	peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaan Mastyarakat Wil Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	20.400.000	
4	PROGRAM KOORDINASI DAN KETRENTAMAN UMUM	Kecamatan Boja	Terlaksananya koordinasi yang dilaksanakan	1 laporan	0	PROGRAM KOORDINASI DAN KETRENTAMAN UMUM	Kecamatan Boja	Terlaksananya koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	49.440.000	
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	18 laporan	0	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	49.440.000	
	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	0	0	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	0	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan	Kecamatan Boja	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali		

	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
5	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	0	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	11.200.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0		
	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	0	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	11.200.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemdes	3 Keg	82.860.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemdes	3 Keg	11.200.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemdes	18 Desa	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemdes	18 Desa	3.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemdes	18 Desa	82.860.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemdes	18 Desa	28.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan	18 dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitas pembinaan pengawasan pemdes	3 Kegiatan	22.600.000	

			pemdes								
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	3 Kegiatan		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	3 Kegiatan		
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	2 dokumen	0	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	3 Kegiatan	3.000.000	
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 laporan	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Boja	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	18 Laporan	3.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah **Sustainable Kendal** yang diprioritaskan pada Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Arah kebijakan ini fokus pada Peningkatan Pendapatan masyarakat, Peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta mewujudkan toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Kendal**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Boja

No	Program/Indikator	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026 yang merupakan tahun keempat periode RPJPN 2025-2045, yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 sesuai dengan program untuk mencapai target sasaran pembangunan 2025, ditetapkan Prioritas Nasional, Delapan agenda pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 tetap dipertahankan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menjadi Prioritas Nasional (PN), dan yang menjadi arah dan kebijakan untuk kecamatan adalah :

- Prioritas Nasional 6 (enam), Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- Prioritas Nasional 7 (Tujuh), memperkuat Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, judi dan penyelundupan
- **Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan Jawa Tengah. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif serta inklusif dan merata
 3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup

4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif

• **Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2026**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah “Sustainable Kendal” dengan prioritas pada “Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.”. Arah Kebijakan ini dengan fokus pada Peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan Gender .

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Boja Tahun 2026 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Tabel 3.1.

Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2026
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026 yang merupakan tahun kelima periode RPJMN 2020-2024, yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan transformasi Sosial, Mewujudkan transformasi Ekonomi, Mewujudkan transformasi tata kelola, memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan	Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 adalah: Penguatan perekonomian daerah, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Peningkatan tata kelola pemerintahan	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah "Sustainable Kendal" dengan prioritas pada "Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.". Arah Kebijakan ini dengan fokus pada Peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya toleransi antar umat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indonesia, Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, Mewujudkan Pembangunan ke wilayah yang merata dan berkeadilan, Mewujudkan sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, Mewujudkan kesinambungan pembangunan”		beragama dan kesetaraan Gender	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Boja Tahun 2026 adalah dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, yaitu “Mewujudkan visi pembangunan jangka menengah yaitu Kendal Handal, Unggul, Makmur, dan Berkeadilan. Sedangkan visi misi Kepala Daerah terpilih, Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 ditekan pada :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah
2. Meningkatkan Ketahanan daerah dalam penanganan bencana
3. Meningkatkan Kondusifitas Wilayah
4. Menurunnya Kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia
6. Meningkatkan Reformasi birokrasi
7. Meningkatkan Ketahanan pangan daerah
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah
9. Meningkatkan sector perekonomian daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ;
2. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat kecamatan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Boja mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dimana pada tahun 2026 mendatang Kecamatan Boja diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana tersebut di atas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Boja Tahun 2026 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan, Rencana Kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sedangkan tujuan dan sasaran program Kecamatan Boja Tahun 2026 secara umum adalah:

- Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Nilai rata-rata IKM dengan target di tahun 2026 adalah 93
- Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan target kinerja Nilai SAKIP tahun 2026 adalah 77, seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.3
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOJA
TAHUN 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	skor	93
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	skor	77

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berikut adalah Program dan Kegiatan Kecamatan Boja yang menunjang pencapaian visi misi Kepala Daerah Kabupaten Kendal pada misi kedua yaitu Terciptanya tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, Profesional, Akuntabel, sinergi, transparan dan inklusif, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :
 - a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d) Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - e) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- f) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan :
 - a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan :
 - a) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan :
 - a) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan:

a) Fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitas penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
- Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Kecamatan Boja merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- **Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan** diantaranya adalah :

- a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Boja diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Boja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kedua yaitu Terciptanya tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, Profesional, Akuntabel, sinergi, transparan dan inklusif.

Misi kedua bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan" : Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/reol time budgeting), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

- b. Pencapaian SDGs

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi.

Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan

pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

c. Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan,

rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan

d. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

- **Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :
- Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Boja Tahun 2026 adalah 6 program, 12 Kegiatan dan 29 Sub kegiatan .
- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan
- Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Boja sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Boja dan melingkupi semua desa 18 (Delapan belas) desa.
- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

8) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

9) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan :

- b) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

10) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- b) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

11) Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

12) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**
 - Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
- **Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:**

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Boja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat daerah	Kecamatan Boja	100 %	3.930.733.119	DAU dan PAD		100%	3.339.838.500
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		5 dokumen	0	PAD		100%	7.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan		2 laporan	0	PAD		100%	7.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan		14 bulan	4.095.185.963	PAD		100%	4.103.672.862
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 org/bulan	3.552.028.119	DAU		100%	4.103.672.862
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		1 dokumen	0	PAD		100%	-
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pakaian dinas harian dan emblem/Id card yang		38 Paket	0	PAD		100%	25.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		38 Paket	0	PAD		100%	25.000.000
	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan		12 Bulan	213.312.450	PAD		100%	312.805.201
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12Paket	3.566.400	PAD		100%	3.000.000.00

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.352.000	PAD		100%	57.252.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.010.000	PAD		100%	5.200.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.500.000	PAD		100%	4.200.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	27.807.050	PAD		100%	25.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	128.077.000	PAD		100%	375.668.634
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah aset yang diadakan	10 paket	0	PAD		100%	175.000.000
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit	0	PAD		100%	25.000.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	PAD		100%	150.000.000,00
				Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12 Bulan	131.686.000	PAD		100%	156.300.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.500.000	PAD		100%	6.500.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	61.250.000	PAD		100%	66.300.000

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 Laporan	63.936.000	PAD		100%	193.500.000
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		15 unit	33.706.550	PAD		100%	74.929.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan		12 Unit	26.895.550	PAD		100%	50.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	6.810.000	PAD		100%	24.929.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	prosentase Pelimpahan pelaksanaan Kewenangan kecamatan	Kecamatan Boja	1 laporan	19.965.000	PAD		100%	5.000.000
			Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat jumlah dokumen pelaksanaan		1 dokumen	19.965.000	PAD		100%	7.750.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		1dokumen	0	PAD		100%	5.000.000,00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 Laporan	19.965.000	PAD		100%	2.750.000
7	01	03	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat dalam musernbang RKPD	Kecamatan Boja	100 %	118.480.000	PAD		100%	249.520.000
			Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang		1 Laporan	118.480.000	PAD		100%	249.520.0000
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		18 Lembaga Kemasyar akatan	15.200.000	PAD		100%	25.000.000

			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan</i>		2 Dokumen	90.890.000	PAD		100%	154.120.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		2 Laporan	12.390.000	PAD		100%	70.400.000
7	02	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Boja	1laporan	0	PAD		90%	10.000.000
			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum	<i>jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan</i>		1 Laporan	0	PAD		100%	10.000.000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		18 Laporan	0	PAD		100%	10.000.000,00
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	Kecamatan Boja	1 Laporan	0	PAD		100%	11.200.000
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah dokumen kegiatan pemerintahan Umum yang dilaksanakan</i>		1 laporan	0	PAD		100%	11.200.000
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		1 Laporan	0	PAD		100%	11.200.0000
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kecamatan Boja	100%	82.860.000	PAD		100%	59.600.000
			Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa</i>		18 Dokumen	82.860.000	PAD		100%	59.600.000
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>		18 Dokumen	0	PAD		100%	59.600.000

				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		18 Dokumen	0	PAD		100%	3.000.000
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 7.700.000,00 Kab. Kendal, Boja, Semua		18 Dokumen	82.860.000	PAD		100%	28.000.000,00
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		18 Dokumen	0	PAD		100%	22.600.000,00
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		2 dokumen	0	PAD		100%	3.000.000,00
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahny		18 Dokumen	0	PAD		100%	3.000.000,00
								4.152.038.119				4.088.528.439

5. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi di Kecamatan Boja Tahun 2024 dan masih sampai dengan sekarang adalah **“SI ORAK PEDE”** (Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa). Laporan Keuangan Desa ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepada Masyarakat Desa atas penggunaan dana yang disalurkan melalui APBN, APBD, Bantuan Keuangan, swadaya masyarakat desa atau sumber lain yang sah. Laporan Aksi Perubahan ini adalah laporan dari implementasi Rancangan Aksi Perubahan yang dilaksanakan dalam jangka pendek yaitu kurang lebih 2 bulan. Dan berdasarkan Analisa ASTRID pada Rancangan Aksi Perubahan diperoleh isu faktual yaitu belum optimalnya pelaporan keuangan desa. Inovasi dengan judul **“SI ORAK PEDE”** (Sistem Informasi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Desa) ini bertujuan agar Peningkatan kemampuan SDM Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan), efektif efisiensi waktu, minimalis penggunaan kertas, mengurangi biaya perjalanan dan utamanya terkirimnya laporan keuangan desa bulanan kepada Kantor Kecamatan Boja tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Setelah dilaksanakan implementasi SI ORAK PEDE dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan, hasil yang didapatkan sungguh luar biasa bahwa secara pelaporan pemerintah desa bisa lebih cepat sehingga untuk penyaluran dana tahap selanjutnya menjadi lebih lancar.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menangani sabagai urusan otonomi daerah, dan sebagai penjabaran misi yang kelima seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Kecamatan Boja yaitu “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan”. Tahun 2026 Kecamatan Boja memasang Plafon Anggaran sebesar Rp 4.152.038.119,- (Empat milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus Sembilan belas rupiah), sehingga dapat dijabarkan dalam program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah Pencapaian visi misi Kepala Daerah. Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Boja diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Boja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.
- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Jumlah Program dan jumlah Kegiatan antara lain :
Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Boja Tahun 2026 adalah 6 program dengan 12 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Boja sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Boja dan melingkupi semua desa 18 (delapan belas) desa.
- c. Program Prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2026 adalah :
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Anggaran Rp. 19.965.000,00 terdiri dari 1 kegiatan :
 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dianggarkan 19.965.000,00 dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha Rp. 0,00,- pada kegiatan ini merupakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha, Anggaran ini berdampak efisiensi
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp. 19.965.000,00,- pada kegiatan ini merupakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- A. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan, anggaran sebesar Rp. 118.480.000,- dipergunakan untuk :
- 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sebesar Rp. 118.480.000,-
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan sebesar Rp. 15.200.000,00 yang aktivitasnya berupa pelaksanaan Musrenbangcam sebagai sarana untuk menyampaikan usulan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari tingkat desa untuk disampaikan di tingkat Kecamatan yang nantinya akan disampaikan ke tingkat Kabupaten
 - c. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan Rp. 90.890.000,00 yang aktivitasnya dengan melaksanakan pameran produk UMKM dari wilayah kecamatan Boja, di Pekan Raya Kendal serta melaksanakan pelatihan peningkatan hasil produk UMKM bagi pelaku UMKM Kecamatan Boja.
 - d. Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Rp. 12.390.000,00 aktifitasnya adalah kegiatan Raker PKK yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan pleno PKK tingkat Kecamatan Boja yang dilaksanakan setiap bulan, untuk meningkatkan peran serta PKK dalam pembangunan khususnya di wilayah Kecamatan Boja.

B. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum, anggaran sebesar Rp. 0,00 dipergunakan untuk :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 0,00

a. Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 0,00 kegiatan ini diperuntukan untuk menopang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggaran ini berdampak efesiensi

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran sebesar Rp. 0,00 dipergunakan untuk :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah Rp. 0,00

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 0,00, kegiatan ini adalah forum Koordinasi antara pimpinan di kecamatan di Kecamatan Boja, kerjasama antara CAMAT,TNI dan POLRI, dan merupakan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan, Anggaran ini berdampak efesiensi

D. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, anggaran sebesar Rp.82.860.000,00

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 82.860.000,00

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sebesar Rp 0,00, dengan aktifitas melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa dan Penyusunan Peraturan Kepala Desa untuk 18 desa diwilayah Kecamatan Boja agar Perdes dan Perkades yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran ini berdampak efesiensi

b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 82.860.000,00, melakukan pendampingan dan monev agar tercipta tertib administrasi umum, kependudukan,keuangan, pembangunan serta administrasi lainnya

- c. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebesar Rp. 0,00 dengan melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penggunaan dan pertanggung jawaban (SPJ) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan aktifitas melakukan pendampingan dalam pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk 18 desa diwilayah Kecamatan Boja
 - e. Koordinasi Pendampingan Desa dan wilayahnya, sebesar Rp. 0,00 dengan aktifitas melakukan Pendampingan Desa dan wilayahnya, untuk 18 desa diwilayah Kecamatan Boja
- E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 3.930.733.119,00 yang terdiri dari 7 Kegiatan 17 Sub Kegiatan, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan diperlukan sarana dan prasarana baik itu gaji, tunjangan, gedung, peralatan komputer, ATK, peralatan listrik, ketersediaan listrik, air, telepon dan wifi, pemeliharaan sepeda motor maupun mobil dinas ,dan lain-lain maupun kenyamanan ruang untuk pelayanan dan melaksanakan tugas.*
- 1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 0,00 kegiatan ini dipergunakan untuk rapat-rapat koordinasi berkaitan dengan penyusunan laporan Perencanaan dan Keuangan, Anggaran ini terdampak efesiensi
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 3.552.028.119,00 kegiatan ini dipergunakan untuk pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN di kecamatan Boja dengan jumlah 35 orang ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 0,00,- dipergunakan untuk pembelian Pakaian Dinas untuk para ASN (Aparatur Sipil Negara) sejumlah 35 paket, Anggaran ini berdampak efisiensi
4. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp. 3.566.400,00 kegiatan ini untuk memenuhi komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 41.352.000,00 kegiatan ini untuk memenuhi peralatan dan perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 7.010.000,00 kegiatan ini untuk memenuhi peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 5.500.000,00 kegiatan ini untuk memenuhi bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Rp. 27.807.050,00 kegiatan ini untuk memenuhi Barang cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 128.077.000,00 kegiatan ini untuk memenuhi rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah
 - a. Pengadaan Mebel dianggarkan Rp 0,00 kegiatan ini untuk pembelian Meja dan kursi staf , Anggaran ini berdampak efisiensi
 - b. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 0,00 kegiatan ini untuk memenuhi Peralatan dan mesin lainnya seperti Pembelian Komputer, Laptop, Printer, Reuter dan instalasi, Anggaran ini berdampak efisiensi
6. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan surat menyurat Rp. 6.500.000,00 kegiatan ini untuk memenuhi surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Rp. 61.250.000,00 kegiatan ini untuk memenuhi jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 63.936.000,00 kegiatan ini untuk memenuhi jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah sebesar Rp. 33.706.550,00
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan Rp. 26.869.550,00 kegiatan ini untuk memenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 6.810.000,00 kegiatan ini untuk memenuhi jasa Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 0,00 kegiatan ini untuk memenuhi jasa Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan, Anggaran ini terdampak efisiensi

Jumlah Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 4.152.038.119,00 (*Empat milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh delapan ribu seratus Sembilan belas rupiah*)

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah terlampit pada tabel hasil print out SIPD RI dibawah ini :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Boja di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Boja pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Boja ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Boja Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Rencana Kerja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Boja;
3. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Boja ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Boja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Boja Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2026 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Boja, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Boja pada Tahun Anggaran 2026.

Kendal, 29 September 2025
CAMAT BOJA,

SUNARTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199803 1006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. SK Tim Penyusunan Renja Kecamatan Boja Tahun 2026

